

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BULELENG TA 2013

Denpasar, Senin (16 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, I Gede Dharma Widjaya, dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) tidak efektif.
2. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 belum optimal;
3. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng belum tertib.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada 11 SKPD sebesar Rp412.674.250,00.
2. Terdapat somasi dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Pengadaan Barang dan Jasa periode tahun 2008 s.d. 2012 sebesar Rp2.968.318.430,55.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : www.denpasar.bpk.go.id

e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com